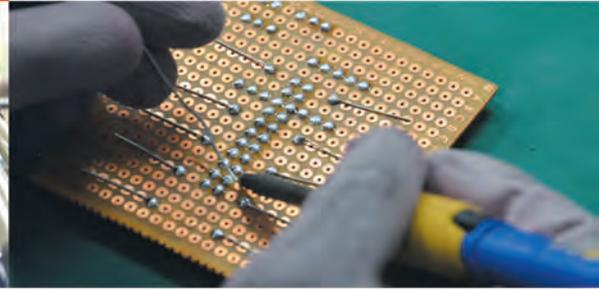




LAKIP 2016



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Kinerja Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri

Balai Diklat Industri Surabaya Kementerian Perindustrian Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2016 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri merupakan salah satu kegiatan Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk menghasilkan SDM industri yang berkompeten.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, serta atas pengarahannya untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri Tahun 2016 ini akan terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi kelancaran pelaksanaan kegiatan serta pelaporannya di masa mendatang.

Surabaya, Januari 2017
Kepala Balai Diklat Industri Surabaya



[Handwritten Signature]
Yulius Sarjono Eddy, SE, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
1.2 Peran Strategis Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Organisasi	4
2.2 Rencana Kinerja	22
2.3 Rencana Anggaran	23
2.4 Dokumen Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2 Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	
1. Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja	
2. Pengukuran Kinerja (Berdasarkan Penetapan/Perjanjian Kinerja)	
3. Realisasi Anggaran Belanja Bulanan (E-Monitoring)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Diklat Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri;
- c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah yang berbasis spesialisasi dan kompetensi;
- d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri;
- e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah;
- f. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri;
- g. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri;
- h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan industri;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha Balai Diklat Industri.

1.2 Peran Strategis Organisasi

Balai Diklat Industri Surabaya merupakan unit di bawah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian. Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Strategis Organisasi yang hendak dicapai oleh Balai Diklat Industri Surabaya adalah: “a) Penerapan good governance dengan memanfaatkan IT dan ISO 9000 –2008; b) Meningkatkan kerjasama lembaga untuk membangun kurikulum & modul berbasis kompetensi; c) Mempersiapkan BDI Surabaya dalam konsentrasi diklat di bidang tekstil, elektronika dan telematika.

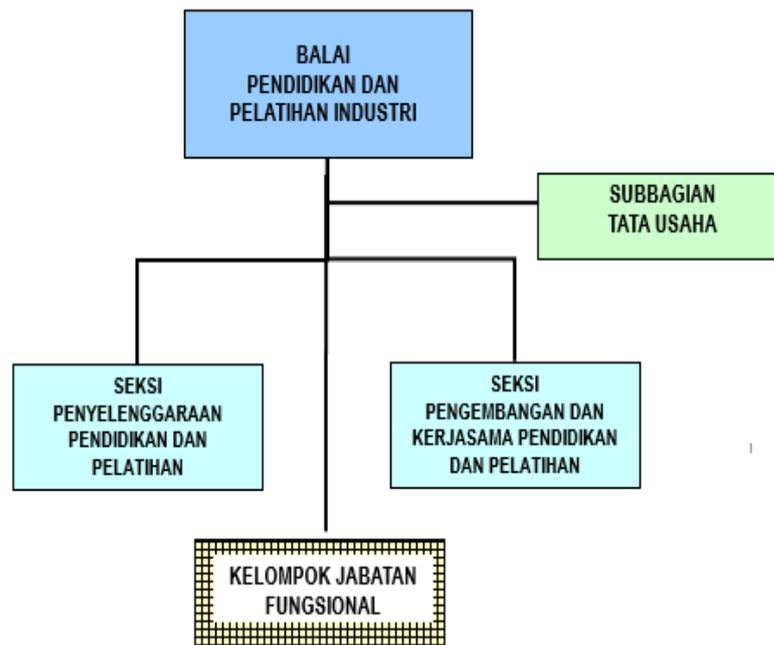
1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Diklat Industri Surabaya terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 4 orang dengan rincian jabatan struktural:

1. Satu orang Kepala Balai Diklat Industri Surabaya;
2. Satu orang Kepala Subbagian Tata Usaha
3. Satu orang Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4. Satu orang Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Surabaya



Tugas Pokok masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja, keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri.
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- c. Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan *workshop/teaching factory/* inkubator bisnis.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Balai Diklat Industri Surabaya telah menetapkan visi, misi, tujuan, strategi dan program baik jangka pendek maupun jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019, sebagai berikut:

- Visi : Balai Diklat Industri sebagai *role model* lembaga pelatihan industri yang menghasilkan tenaga kerja industri kompeten dan berdaya saing.
- Misi:
 1. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha industri
 2. Mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan dunia industri
 3. Sebagai lembaga pelatihan yang “elite” dalam pengertian terkenal, disegani dan dibutuhkan oleh kalangan industri
 4. Mengembangkan *workshop* sesuai spesialisasi dan kompetensi
 5. Mengembangkan spesialisasi serta jenis dan jenjang pelatihan sesuai kebutuhan industri
 6. Meningkatkan kapasitas pelatihan
 7. Mengembangkan inkubator bisnis industri melalui paket pelatihan yang terintegrasi dengan bantuan peralatan.

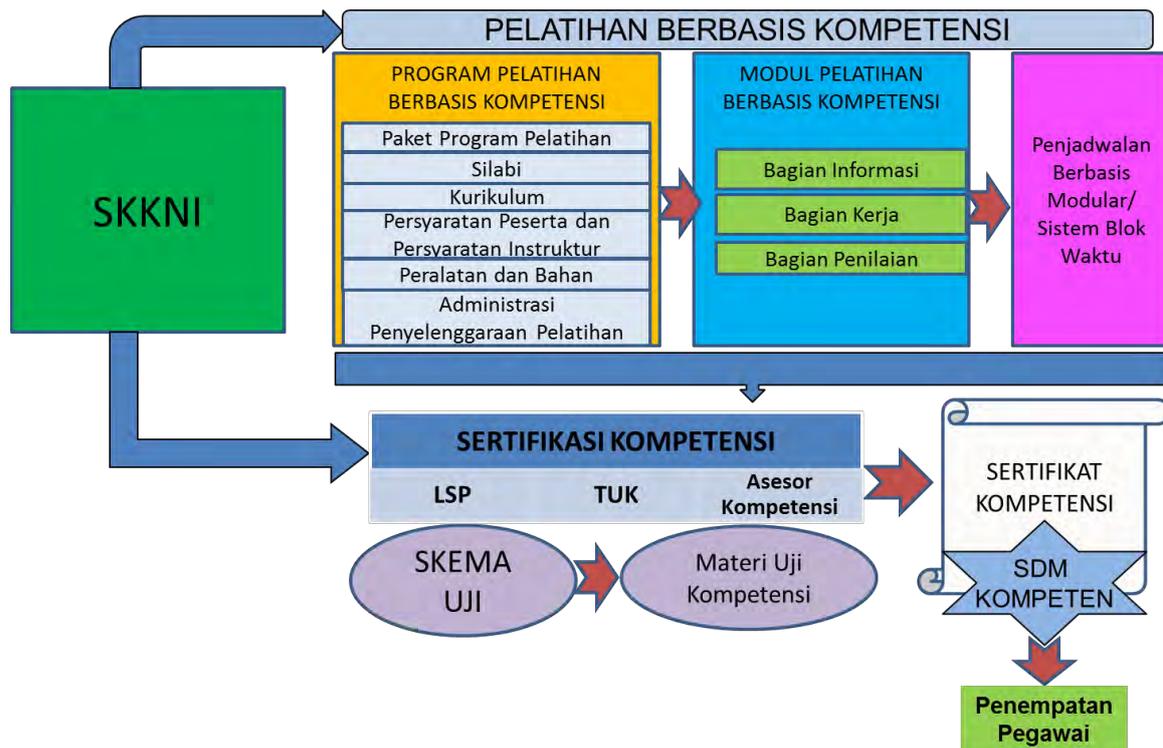
Balai Diklat Industri Surabaya mempunyai rencana strategis dengan fokus kegiatan “Peningkatan Kualitas SDM Industri”.

Untuk mewujudkan hasil tersebut, Balai Diklat Industri Surabaya mengimplementasikan Kebijakan Reposisi Tahap II. Implementasi atas kebijakan Reposisi Tahap II Balai Diklat Industri diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan sistem *three in one* dan penyelenggaraan Inkubator Bisnis.

A. Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi menggunakan sistem *three in one*

Pelatihan yang dikembangkan di BDI saat ini adalah pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem *three in one*. Konsep penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi ditunjukkan pada gambar berikut.





Gambar 2. 1 Konsep penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Pelatihan berbasis kompetensi yang dikembangkan oleh BDI memiliki prinsip dasar yaitu:

- 1) Adanya pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki.
- 2) Dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan (*gap competency*)
- 3) Berpusat pada peserta pelatihan dan bersifat individual.
- 4) Dilaksanakan dengan sistem *articulated* sehingga memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan tingkat yang berbeda, sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta pelatihan (*Multi-entry/multi-exit*); dan
- 5) Setiap peserta pelatihan dinilai berdasarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi,

Hal-hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi adalah:

1. Mengidentifikasi dan mengembangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, SKKNI digunakan sebagai acuan utama agar tercipta *link and match* antara kebutuhan dunia industri dengan bekal yang diberikan melalui pelatihan. Pengembangan SKKNI mencakup aktivitas dalam: (1) menyusun RSKKNI; serta (2) melakukan kaji ulang SKKNI guna memelihara validitas dan reliabilitas SKKNI. Penyusunan RSKKNI dapat dilakukan dengan metode:

- 1) Riset dan/atau penyusunan standar baru;
- 2) Adaptasi dari standar internasional atau standar khusus; atau
- 3) Adopsi dari standar internasional atau standar khusus

Prosedur pengembangan SKKNI diatur dalam Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan SKKNI. Tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan SKKNI yaitu:

1) Pembentukan Tim Perumus dan Tim Verifikasi

Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI sektor industri ditetapkan oleh Ketua Komite Standar Kompetensi Sektor Industri, melalui Sekretariat Komite yang berada di Pusdiklat Industri. Komposisi Tim Perumus harus didominasi oleh praktisi industri agar dapat memberikan informasi yang tepat dan sesuai dalam penyusunan standar kompetensi. Adapun unsur akademisi hanya diperlukan untuk memastikan kesesuaian bahasa dan istilah.

2) Perumusan SKKNI

Perumusan SKKNI mengacu pada *Regional Model Competency Standar (RMCS)* yaitu model pengembangan standar kompetensi berdasarkan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang/jasa. Format penulisan dokumen RSKKNI diatur dalam Keputusan Dirjen Binalattas Nomor 189/LATTAS/XII/2013 tentang Pedoman Tatacara Penulisan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

3) Verifikasi Internal

Verifikasi Internal dilakukan untuk memastikan rancangan SKKNI benar secara substansial dan format. Pelaksanaan verifikasi internal dilakukan oleh Tim Verifikasi atau dapat pula dibantu oleh Sekretariat Komite Standar Kompetensi Sektor Industri.

4) Rapat Pra Konvensi RSKKNI

RSKKNI hasil verifikasi internal yang telah diperbaiki dapat melalui tahapan Rapat Pra Konvensi RSKKNI. Rapat ini merupakan pembahasan RSKKNI oleh para pakar dan atau praktisi dari unsur pemangku kepentingan industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, LSP, Instansi Teknis, Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP.

5) Verifikasi Eksternal

RSKKNI hasil perbaikan dari Rapat Pra Konvensi RSKKNI harus melalui tahapan verifikasi eksternal untuk memastikan kesesuaian format dan alur pikir. Pelaksanaan Verifikasi Eksternal dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

6) Rapat Konvensi RSKKNI

RSKKNI hasil perbaikan dari verifikasi eksternal akan dibahas kembali oleh para pakar dan atau praktisi dari unsur pemangku kepentingan industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, LSP, Instansi Teknis, Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP untuk mendapatkan konsensus.

7) Penetapan SKKNI

Usulan penetapan SKKNI sektor industri dilakukan oleh Ketua Komite Standar Kompetensi Sektor Industri kepada Menteri Tenaga Kerja melalui Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja.

Untuk memelihara validitas dan reliabilitas SKKNI yang telah diterapkan, dapat dilakukan kaji ulang SKKNI. Kaji ulang SKKNI dilakukan atas dasar hasil monitoring, evaluasi dan/atau usulan pemangku kepentingan. Prosedur yang harus dilalui untuk melakukan kaji ulang SKKNI sama seperti prosedur dalam menyusun SKKNI, namun pelaksanaan kaji ulang SKKNI harus dilengkapi dengan hasil evaluasi dan monitoring kesesuaian dokumen SKKNI yang akan dikaji ulang. Kaji ulang tersebut meliputi aspek kesesuaian dengan:

- 1) Perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Perubahan cara kerja; dan
- 3) Perubahan lingkungan kerja dan persyaratan kerja

Pelaksanaan kaji ulang SKKNI biasanya diinisiasi oleh praktisi industri. Namun secara reguler, Kementerian Ketenagakerjaan selalu menyampaikan kepada Kementerian Teknis bila ada SKKNI yang usia penetapannya lebih dari 5 (lima) tahun. Hal ini untuk memastikan materi/subtansi yang terkandung dalam SKKNI tersebut masih relevan.

2. Menyusun Program Pelatihan Berbasis Kompetensi

Penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan berbasis kompetensi harus diawali dengan menyiapkan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi yang terdiri:

1) Paket pelatihan

Paket pelatihan disusun dengan mengelompokkan unit-unit kompetensi yang ada dalam satu SKKNI. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menentukan Paket Pelatihan adalah berdasarkan Fungsi Utama yang terdapat pada Peta Kompetensi. Namun dapat pula unit-unit kompetensi dalam satu Paket Pelatihan berasal dari Fungsi Utama yang berbeda. Hal yang perlu dipastikan adalah unit-unit kompetensi dalam satu paket pelatihan tersebut memang dibutuhkan oleh calon pekerja dalam menyiapkan tenaga kerja industri melalui jalur pendidikan dan pelatihan.

2) Silabi

Setiap unit-unit kompetensi dalam suatu paket pelatihan harus dibuatkan silabinya. Silabi akan memuat: (1) indikator pelatihan dari setiap Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja; (2) cakupan materi pelatihan yang dapat berupa aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja; serta (3) alokasi waktu pelatihan untuk aspek pengetahuan dan keterampilan. Silabi harus disusun secara mendetail untuk setiap Kriteria Unjuk Kerja dan Indikator Unjuk Kerja, terutama pada bagian pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut dimaksudkan agar memudahkan dalam: (1) penentuan durasi waktu pelatihan; serta (2) penentuan kandungan isi modul pelatihan berbasis kompetensi.

3) Kurikulum

Selain unit kompetensi, paket pelatihan dapat pula memuat unsur Non Unit Kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan paket pelatihan tersebut. Pembelajaran, baik Unit Kompetensi maupun Non Unit Kompetensi, dapat dilakukan secara: Off the Job Training di dalam workshop dan atau ruang kelas; atau On the Job Training di industri atau Teaching Factory.

Kurikulum merupakan rekapitulasi atas seluruh Unit Kompetensi dan Non Unit Kompetensi yang harus ditempuh dalam suatu Paket Pelatihan, yang dilaksanakan baik secara On The Job Training maupun Off The Job Training.

4) Peralatan dan bahan

Ketersediaan peralatan dan bahan perlu mendapat perhatian demi efektivitas pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Peralatan dan bahan perlu disiapkan mengacu pada kebutuhan masing-masing Unit Kompetensi dan Non Unit Kompetensi pada setiap Paket Pelatihan.

5) Rancangan kegiatan On The Job Training

Rancangan kegiatan On The Job Training tersebut meliputi: indikator pelaksanaan kegiatan, rincian pelaksanaan kegiatan, durasi waktu pelaksanaan serta target output yang harus dicapai pada setiap kegiatan dan rancangan instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Instrumen tersebut harus disesuaikan dengan instruksi kerja yang ada pada setiap industri. Idealnya, OJT dilaksanakan setelah peserta menyelesaikan satu paket pelatihan. Namun agar pelaksanaan OJT yang harus melibatkan industri dapat lebih efisien, maka pada prakteknya pelaksanaan OJT untuk beberapa Paket Pelatihan Berbasis Kompetensi dapat disatukan waktunya.

Prosedur dan format penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi yang telah dijelaskan diatas mengacu pada Kepdirjen Binalattas Nomor KEP.185/LATTAS/XII/2013 tentang Pedoman Penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi memerlukan sejumlah perangkat administrasi, diantaranya daftar hadir, log sheet untuk peserta pelatihan, formulir-formulir yang dibutuhkan baik dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan pelatihan. Log sheet untuk peserta pelatihan dapat digunakan sebagai rujukan penilaian serta sebagai portofolio peserta pelatihan dalam pengujian kompetensi.

3. Menyusun Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

Penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi harus ditindaklanjuti dengan menyusun dan mengembangkan modul pelatihan berbasis kompetensi sehingga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran pada pelatihan berbasis kompetensi. Karakteristik yang harus terkandung dalam Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi yaitu:

- 1) *Self instructional*, artinya peserta pelatihan mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain.

- 2) *Self contained*, artinya seluruh materi pembelajaran dari satu standar kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh.
- 3) *Adaptive*, artinya modul memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.
- 4) *User friendly*, artinya modul memenuhi kaidah bersahabat/akrab dengan pemakainya (*user friendly*).

Agar memenuhi karakteristik tersebut, modul pelatihan berbasis kompetensi terdiri dari:

1) Buku Informasi

Buku informasi berisi penjelasan langkah kerja yang harus dilakukan pada setiap Elemen Kompetensi serta informasi yang relevan dengan langkah kerja tersebut. Pada Buku Informasi konsep dan teori yang terkait dengan Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja tidak perlu dijabarkan secara mendetail. Buku Informasi harus menjelaskan dengan detail seluruh aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk masing-masing Kriteria Unjuk Kerja. Buku Informasi juga harus mencantumkan:

- Daftar Pustaka, yang dapat berupa dasar perundangan yang terkait Unit Kompetensi; serta Buku Referensi yang relevan (berupa buku, majalah, buletin dan referensi lainnya)
- Daftar alat dan bahan yang digunakan

2) Buku Kerja

Buku kerja digunakan sebagai media penilaian formatif, yaitu media untuk memantau kemajuan kompetensi yang dimiliki peserta latihan dalam proses pembelajaran. Di dalam Buku Kerja dicantumkan rincian tugas teori, tugas praktek dan pengamatan sikap kerja yang harus dilakukan peserta diklat pada saat mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, materi penilaian teori lebih tepat menggunakan bentuk essay tertutup yang sifatnya untuk menggali kemampuan peserta.

3) Buku Penilaian

Buku Penilaian dibuat untuk menguji peserta pelatihan setelah selesai menempuh Bagian Informasi dan menyelesaikan Bagian Kerja secara komprehensif. Berdasarkan hasil uji tersebut, peserta dapat dikatakan Kompeten atau Tidak Kompeten terhadap suatu Unit Kompetensi. Metode Penilaian yang dapat dilakukan meliputi:

- Metode Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis, tes wawancara
- Metode Penilaian Keterampilan: Tes Simulasi, Praktek

- Metode Penilaian Sikap Kerja: Observasi

4. Menyiapkan tenaga pengajar dan sarana prasarana pelatihan berbasis kompetensi

Setelah program pelatihan berbasis kompetensi disusun maka hal lain yang perlu dilakukan adalah menginventarisir dan menyiapkan sarana prasarana dan instruktur yang diperlukan pada setiap Paket Program Pelatihan yang ditawarkan.

Untuk menunjang pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan BDI, dibutuhkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan diklat *three in one* ataupun untuk *workshop/teaching factory*.

Tenaga pengajar pelatihan BDI dapat berasal dari widyaiswara, instruktur, praktisi industri dan asosiasi industri/profesi ataupun narasumber lain yang memiliki kompetensi sesuai. Kompetensi dimaksud berupa: (1) kompetensi teknis sesuai spesialisasi yang diajarkan; serta (2) kompetensi metodologi pengajaran. Untuk melengkapi kompetensi metodologi pengajaran tersebut, BDI dapat menyelenggarakan *Training Of Trainer (TOT)* bagi calon tenaga pengajarnya.

5. Membentuk LSP P-1 dan TUK

Sesuai gambar konsep penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pada Gambar 3.1, setelah peserta menempuh proses pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan maka proses selanjutnya adalah proses sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi dilakukan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seseorang melalui uji kompetensi secara sistematis dan obyektif mengacu pada standar kompetensi kerja. Proses sertifikasi dilakukan oleh LSP yang dapat dibentuk oleh BDI. LSP yang dibentuk oleh BDI dikategorikan sebagai LSP pihak pertama, namun tidak menutup kemungkinan BDI dapat bekerjasama dengan LSP yang dibentuk oleh asosiasi industri (LSP Pihak ketiga). LSP Pihak Pertama bertugas memastikan kompetensi peserta pelatihan melalui mekanisme uji kompetensi. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di LSP BDI dilakukan pada akhir pelatihan, sebelum peserta pelatihan ditempatkan di perusahaan industri. Peserta yang mengikuti pelatihan di BDI akan mendapatkan 2 (dua) jenis sertifikat, yaitu: (1) sertifikat bukti kehadiran mengikuti pelatihan; dan (2) sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian masing-masing peserta pelatihan. Sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan di BDI mengacu pada skema sertifikasi yang disesuaikan dengan materi pada Program Pelatihan Berbasis Kompetensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja industri yang disiapkan melalui pelatihan

industri oleh BDI merupakan tenaga kerja industri kompeten yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi di industri.

Saat ini sebagian besar BDI telah membentuk LSP-P1 dan memperoleh lisensi dari BNSP, sementara sebagian lainnya sedang dalam proses pengajuan lisensi oleh BNSP. Prosedur pembentukan LSP-P1 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Mutu dan Skema Sertifikasi

Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan standar dan aturan yang sama. Dalam perjalanannya, LSP dapat melakukan perubahan skema sertifikasi apabila skema sertifikasi dianggap sudah tidak relevan lagi.

Sebagai sebuah lembaga penjamin mutu, LSP harus memiliki sistem dokumentasi mutu yang valid, relevan, konsisten dan tertelusur. Oleh sebab itu di dalam pengelolaan LSP, pemeliharaan Dokumen Mutu wajib dilaksanakan.

2. Penerbitan surat keputusan pembentukan LSP-P1 BDI dari Pimpinan Unit

3. Pengajuan surat permohonan lisensi ke BNSP

4. Rapat apresiasi

Berdasarkan usulan permohonan pembentukan LSP, BNSP menyelenggarakan rapat apresiasi untuk memastikan bahwa calon LSP telah memahami esensi sertifikasi kompetensi, telah memetakan calon asesi dalam jumlah yang memadai dan telah memperoleh dukungan dari pemangku kepentingannya. Dalam rapat apresiasi, BNSP memberikan saran mengenai bentuk organisasi LSP.

5. Penyusunan struktur organisasi dan kelengkapan organisasi LSP

Struktur Organisasi LSP yang dibentuk merupakan struktur organisasi yang terpisah dengan organisasi induk. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi LSP dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi. Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaannya, LSP juga harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai.

6. Audit kecukupan/skema sertifikasi

Pada tahap ini, BNSP akan menilai kecukupan seluruh dokumen dan rekaman yang disampaikan serta melakukan verifikasi skema sertifikasi.

7. Asesmen lapangan

BNSP dapat pula melakukan uji lapangan untuk memastikan kebenaran dokumen yang disampaikan. Hal tersebut dilakukan apabila BNSP memandang perlu untuk menggali informasi lebih banyak dalam penentuan lisensi LSP.

8. Penetapan lisensi LSP oleh BNSP

Penetapan lisensi LSP oleh BNSP dilakukan apabila seluruh dokumen dan hasil asesmen lapangan menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan LSP. Lisensi LSP berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang. BNSP akan melakukan surveilan kepada LSP terlisensi minimal sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

9. Penyaksian pelaksanaan uji kompetensi (*witnesses*)

Penyaksian pelaksanaan uji kompetensi dilakukan untuk menunjukkan bukti obyektif bahwa LSP kompeten dan bekerja sesuai standar. Dapat dilaksanakan pada saat asesmen lapangan atau paling lambat 3 bulan setelah mendapat lisensi.

Untuk pelaksanaan uji kompetensi, LSP akan menunjuk Tempat Uji Kompetensi (TUK). Setiap BDI telah dilengkapi dengan workshop dan sarana prasarana sesuai bidang spesialisasinya. *Workshop* tersebut dapat dijadikan TUK setelah diverifikasi dan ditetapkan oleh LSP. Dengan demikian, TUK yang dimiliki BDI dikategorikan sebagai TUK Sewaktu. Berdasarkan jenisnya, TUK terdiri dari:

1. TUK Tempat Kerja, yaitu tempat uji kompetensi yang dimiliki oleh industri. TUK tempat kerja diverifikasi setiap akan digunakan sebagai tempat uji.
2. TUK Sewaktu, yaitu TUK bukan di tempat kerja yang dapat digunakan secara insidental. TUK sewaktu diverifikasi oleh LSP setiap akan digunakan oleh LSP.
3. TUK Mandiri, yaitu TUK bukan di tempat kerja yang digunakan sebagai tempat uji secara berkelanjutan.

6. Mengembangkan Teaching Factory

BDI pada Tahap II akan menyelenggarakan program *teaching factory* dengan memanfaatkan fasilitas praktek/*workshop* yang ada. Proses pembelajaran pada *teaching factory* menekankan pada keahlian atau ketrampilan yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya (*real job*) untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen. *Teaching Factory* merupakan salah satu wahana untuk menyiapkan SDM industri yang siap kerja sekaligus siap berwirausaha. Oleh karena itu program *teaching factory* dapat disinergikan dengan program pelatihan berbasis kompetensi dan program inkubator bisnis.

B. Penyelenggaraan Inkubator Bisnis

Program pengembangan wirausaha nasional telah menjadi salah satu program utama pemerintah. Pada tahun 2013 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 untuk memberi payung hukum penyelenggaraan kegiatan inkubator bisnis. Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing nasional perlu ditumbuhkan wirausaha baru. Guna menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan jejaring usaha dibutuhkan suatu wahana yang dikenal sebagai inkubator bisnis industri atau inkubator bisnis. Definisi Inkubator Bisnis menurut Perpres Nomor 27 Tahun 2013 adalah lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap Peserta Inkubasi (*Tenant*). Inkubasi yang dilakukan dapat berupa pembinaan, pendampingan dan pengembangan sesuai kebutuhan peserta inkubasi.

Dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah disebutkan wirausaha industri merupakan salah satu sumber daya manusia industri. Pembangunan wirausaha industri bertujuan untuk menciptakan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta berkompetensi di bidang usahanya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan melalui pelatihan, kemitraan dan inkubator bisnis industri atau inkubator bisnis.

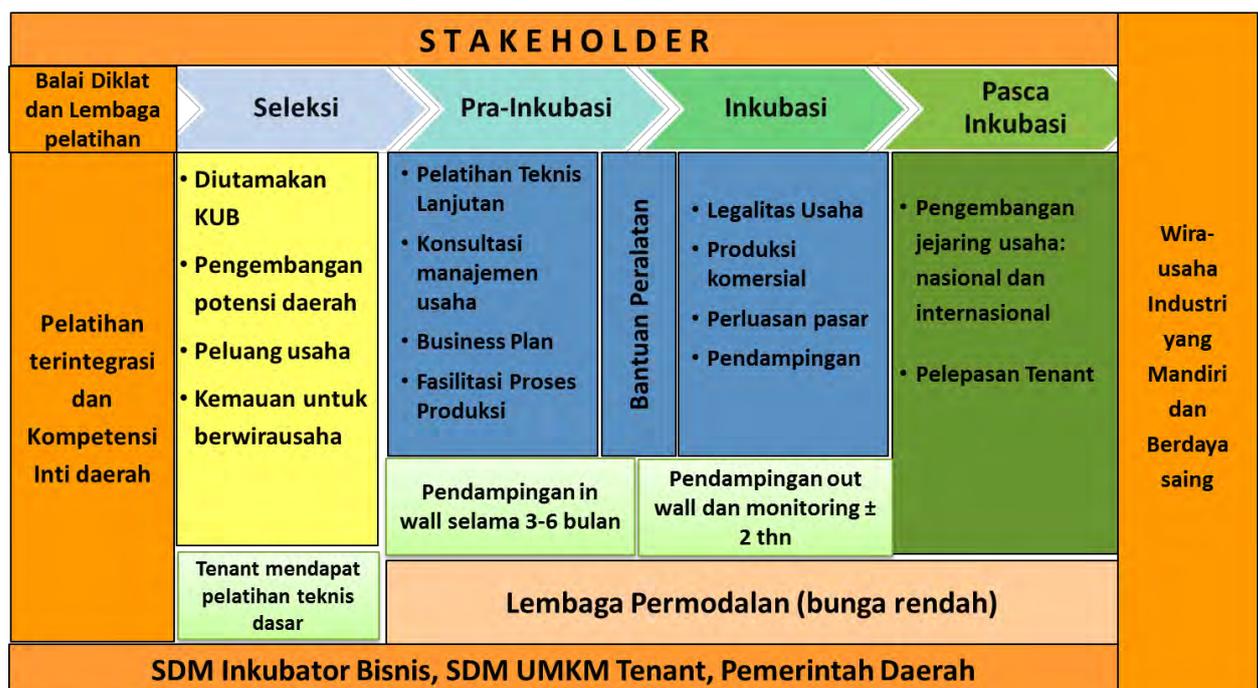
Dengan mengacu kepada tugas pokok fungsi dan spesialisasi kompetensi dari setiap satuan kerja di bawah Pusdiklat Industri, kegiatan Inkubator industri dibagi menjadi dua model, yaitu :

1. **Inkubator bisnis yang terstruktur dan komprehensif** adalah inkubator yang didukung pemerintah dan lembaga non-profit. Tujuannya penciptaan lapangan kerja biasanya untuk mengatasi tingkat pengangguran;
2. **Inkubator bisnis yang terintegrasi dengan pelatihan dan bantuan peralatan** adalah inkubator yang bertujuan untuk melakukan komersialisasi *science*, teknologi dan HAKI dari hasil penelitian. Inkubator ini didukung langsung oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait. Konsep Inkubator Bisnis yang dikembangkan ini merupakan wahana bagi komersialisasi riset dan penciptaan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya tercipta rantai susulan lapangan kerja (job creation), yang diharapkan terciptanya suatu proses usaha yang mempunyai nilai tambah, mampu menciptakan lapangan kerja dan jalinan kerjasama yang erat antara universitas-industri-masyarakat-pemerintah. Rangkaian proses ini akan mampu mengubah penemuan-penemuan baru menjadi inovasi, sehingga terjadi proses

penciptaan nilai (*value creation*) yang akan memberikan dampak positif pada munculnya komersialisasi teknologi yang mampu mendorong penciptaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social wealth creation and social wealth improvement*).

Tipe inkubator bisnis yang diterapkan di BDI mengacu pada tipe inkubator bisnis yang terintegrasi dengan pelatihan dan bantuan peralatan, dengan mengoptimalkan pelatihan dan penggunaan peralatan yang ada di BDI untuk menciptakan wirausaha baru. Pola penciptaan wirausaha baru melalui inkubasi bisnis dilakukan dengan cara pembinaan di bawah satu atap (*in wall*) dan pembinaan di luar atap (*out wall*). Model inkubasi *in wall* yaitu kegiatan pelatihan, pemagangan, sampai dengan perintisan usaha produktif yang dilakukan di dalam satu unit gedung. Setiap peserta/anggota (*tenant*) melakukan aktivitasnya di dalam ruangan masing-masing yang telah disediakan inkubator. Adapun pada model inkubasi *out wall*, kegiatan/aktivitas usaha ekonomi produktif tidak dilakukan dalam satu atap, melainkan secara terpecah di luar pusat manajemen inkubator. Hal tersebut dimungkinkan karena pada model inkubasi *out wall* ini wujud dan kegiatan usaha sudah berjalan, inkubator bisnis berfungsi sebagai konsultan, pendamping, dan embina kegiatan usaha. Sehingga, pada model *out wall* ini lebih cenderung menyerupai jaringan kerja (*business networking*).

Skema proses penyelenggaraan inkubator bisnis yang diterapkan di BDI adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Proses Inkubator Bisnis

Program Inkubator Bisnis yang dilaksanakan BDI dikembangkan terintegrasi dengan pelaksanaan pelatihan sesuai kompetensi inti daerah, dan difokuskan pada peserta pelatihan yang memiliki minat untuk menjadi wirausaha baru. Tahapan proses program Inkubator Bisnis tersebut sebagaimana digambarkan pada diagram diatas, yaitu:

1. Seleksi calon peserta

Sebelum mengikuti pelatihan dan program inkubasi, calon wirausaha industri harus diseleksi terlebih dahulu. Seleksi yang dilakukan mencakup aspek: calon peserta diutamakan berasal dari KUB, sesuai dengan pengembangan potensi daerah, dan memiliki kemauan untuk berwirausaha. Pada tahapan ini, peserta yang dinyatakan memenuhi kriteria diberikan pelatihan teknis dasar sebagai wirausaha.

2. Pra Inkubasi

Pada tahapan ini para peserta akan diberikan penguatan dari sisi kemampuan teknis, manajemen, dan kemampuan *softskill* lainnya terkait pengelolaan usaha melalui kegiatan seminar, workshop, pelatihan bisnis, konsultasi serta motivasi oleh para pendamping dan narasumber. Dalam penyelenggaraan Inkubator Bisnis di BDI, tenaga pendamping dan narasumber dapat berasal dari widyaiswara atau tenaga pengajar dari luar BDI yang kompeten. Penyelenggaraan tahapan Pra Inkubasi dilakukan secara *in wall* selama 3-6 bulan. Setelah melaksanakan inkubasi *In Wall* diharapkan peserta sudah mampu memulai bisnisnya sebagai wirausaha industri. Sehingga setelah melalui fase Pra Inkubasi, peserta dapat diberikan bantuan peralatan sesuai kebutuhan peserta dan kemampuan BDI.

3. Inkubasi

Fase inkubasi dilaksanakan dengan cara *Out Wall* dengan memberikan pendampingan dan penguatan kompetensi kepada calon wirausaha. Substansi pendampingan yang diberikan meliputi legalitas usaha, produksi komersial serta perluasan pasar.

Di akhir fase inkubasi dapat dilaksanakan evaluasi (monev) untuk menilai kinerja dan minat peserta sebelum memasuki fase selanjutnya. Berdasarkan hasil evaluasi ini, hanya peserta yang memiliki minat dan kemampuan tinggi untuk menjadi wirausaha industri saja yang akan memasuki fase pasca inkubasi.

4. Pasca Inkubasi

Pada tahapan ini para peserta sudah dilepas untuk mulai menjalankan usahanya, tetapi masih dipantau oleh pengelola inkubator BDI. Pada fase ini peserta juga mendapatkan bimbingan teknis untuk pengelolaan usahanya. Proses pendampingan kepada peserta

dapat dilakukan dengan menunjau langsung lokasi usahanya dengan melibatkan pembina industri setempat yang memiliki kompetensi kewirausahaan dan menguasai dasar sistem industri. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh permasalahan yang dihadapi peserta dalam menjalankan usahanya dapat diberikan solusi-solusi praktis.

Dalam fase pasca inkubasi peserta juga mendapatkan layanan penunjang lain, seperti:

- 1) Pengembangan akses pasar melalui kegiatan promosi produk, publikasi sentra, workshop/seminar pemasaran, dan pameran.
- 2) Pengembangan akses permodalan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan permodalan seperti instansi pemerintah, bank, BUMN, serta lembaga permodalan lainnya
- 3) Pengembangan jejaring kerja sentra melalui pertemuan antar sentra binaan dan pertemuan antara sentra-sentra binaan dengan para distributor, eksportir, asosiasi, serta lembaga inkubator bisnis lain.

Program pengembangan Balai Diklat Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian dilakukan dengan langkah operasional yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengembangan penyediaan Infrastruktur Kompetensi

Tersedianya Infrastruktur Kompetensi menjadi kunci penting dalam pelaksanaan kegiatan di BDI. Pada masa Reposisi Tahap I, BDI telah mengidentifikasi dan mengembangkan infrastruktur kompetensi yang relevan dengan bidang spesialisasinya. Pada masa Reposisi Tahap II ini langkah penyediaan Infrastruktur Kompetensi terus dikembangkan, yaitu:

Tabel 2.1 Langkah pengembangan penyediaan Infrastruktur Kompetensi

No	Infrastruktur Kompetensi	Langkah Pengembangan
1	SKKNI	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi kembali kebutuhan SKKNI sesuai spesialisasi masing-masing BDI. - Melakukan inisiasi penyusunan SKKNI baru bersama <i>stakeholder</i> terkait dengan bidang spesialisasi. - Melakukan kaji ulang terhadap SKKNI acuan sehingga sesuai dengan perkembangan industrinya.
2	LSP	<ul style="list-style-type: none"> - Memproses pendirian LSP bagi BDI yang belum memiliki LSP. - Memperluas ruang lingkup dan skema sertifikasi LSP BDI sesuai spesialisasi masing-masing BDI. - Mengembangkan Materi Uji Kompetensi sesuai skema sertifikasi yang digunakan.
3	TUK	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi sarana dan prasarana sehingga layak digunakan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).

No	Infrastruktur Kompetensi	Langkah Pengembangan
		- Melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan industri atau lembaga pendidikan/lembaga pelatihan yang memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan Tempat Uji Kompetensi.
4	Asesor Kompetensi	- Meningkatkan jumlah tenaga asesor kompetensi pada LSP, baik berasal dari pegawai BDI maupun tenaga kerja industri yang memenuhi persyaratan sebagai asesor sehingga memiliki kompetensi teknis dan metodologi asesmen.

2. Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi

Pada Reposisi Tahap I, sebagian besar BDI melakukan pelatihan yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Pada fase pematangan di Reposisi Tahap II ini seluruh BDI bertekad untuk mengarahkan kegiatan pelatihannya menjadi Pelatihan Berbasis Kompetensi. Langkah-langkah yang dilakukan BDI untuk mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi sesuai spesialisasinya yaitu:

Tabel 2. 2 Langkah pengembangan pelatihan berbasis kompetensi

No	Langkah pengembangan	Tujuan Kegiatan
1	Identifikasi kebutuhan pengembangan pelatihan	- Menggali informasi tentang kebutuhan jumlah dan kompetensi tenaga kerja sektor industri - Memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi tenaga kerja dengan SKKNI yang diacu oleh BDI dalam penyelenggaraan pelatihan
2	Menyusun program pelatihan berbasis kompetensi	- Menentukan materi, durasi waktu dan penjadwalan pelatihan yang dibutuhkan peserta untuk mencapai kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri
3	Menyusun modul pelatihan berbasis kompetensi	- Menyediakan modul pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelatihan
4	Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi	- Menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten bagi perusahaan industri sesuai bidang spesialisasi masing-masing BDI
5	Sertifikasi kompetensi lulusan pelatihan	- Memastikan kompetensi yang dimiliki peserta pelatihan telah sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan industri
6	Menempatkan lulusan pelatihan yang kompeten pada perusahaan industri	- Mengisi pasar tenaga kerja sektor industri dengan tenaga kerja industri yang kompeten - Mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
7	Evaluasi pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	Mengkaji keberhasilan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dari berbagai segi, seperti: kesesuaian kedalaman materi dan durasi waktu pelatihan, efektivitas pelaksanaan pelatihan oleh instruktur dan pengelola

No	Langkah pengembangan	Tujuan Kegiatan
		pelatihan, kelengkapan sarana prasarana penunjang pelatihan

3. Pengembangan SDM

Agar dapat melaksanakan tugas sebagai lembaga pelatihan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri, BDI perlu menyiapkan sumber daya manusianya melalui serangkaian langkah pengembangan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Langkah pengembangan SDM BDI

No	SDM	Langkah Pengembangan
1	Widyaiswara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengikuti program magang industri pada perusahaan sesuai spesialisasi BDI. 2) Menyiapkan agar seluruh widyaiswara memiliki sertifikat asesor kompetensi, sehingga memiliki kompetensi teknis dan metodologi asesmen. 3) Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan LSP, TUK, <i>Teaching Factory</i>, Unit Produksi dan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
2	Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengikuti program magang industri pada perusahaan sesuai spesialisasi BDI. 2) Mengikuti diklat pegawai minimal 1 kali dalam setahun. 3) Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan LSP, TUK, <i>Teaching Factory</i>, Unit Produksi dan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
3	Instruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Merekrut instruktur sesuai bidang spesialisasi BDI, apabila tidak memiliki widyaiswara dengan kompetensi yang sesuai. 2) Menyiapkan seluruh instruktur agar memiliki sertifikat asesor kompetensi sehingga memiliki kompetensi teknis dan metodologi asesmen.

4. Pengembangan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BDI selama ini telah representatif dan memadai. Namun pengembangan tetap harus diperlukan agar BDI dapat memaksimalkan seluruh sumber dayanya guna mencapai visi yang diharapkan. Langkah-langkah pengembangan yang perlu dilakukan yaitu:

Tabel 2. 4 Langkah pengembangan sarana dan prasarana BDI

No.	Sarana dan Prasarana	Langkah Pengembangan
1.	Ruang kelas	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan ruang kelas sesuai kapasitas peserta pelatihan - Melengkapi ruang kelas dengan sarana prasarana yang menunjang penyelenggaraan pelatihan
2.	<i>Workshop</i> dan <i>teaching factory</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi jumlah dan jenis mesin dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan di <i>workshop</i> dan <i>teaching factory</i> - Mengelola mesin dan peralatan yang ada sehingga berdaya guna. - Membangun kegiatan produksi dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki
3.	Asrama	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan asrama di lingkungan BDI sesuai kapasitas peserta pelatihan - Melengkapi kebutuhan asrama dengan sarana prasarana yang memadai sesuai kondisi lingkungan asrama tempat kerja

5. Penyelenggaraan Inkubator Bisnis

Selain menyediakan tenaga kerja industri yang kompeten, BDI juga dituntut untuk mampu menghasilkan wirausaha industri yang kompeten dan berdaya saing. Langkah-langkah pengembangan yang dilakukan antara lain:

Tabel 2. 5 Langkah penyelenggaraan inkubator bisnis

No	Langkah Pengembangan	Tujuan Kegiatan
1.	Mendesain pelatihan wirausaha yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membekali calon wirausaha industri dengan kompetensi teknis dan manajerial - Membangun kreativitas dan inovasi calon wirausaha
2.	Melengkapi sarana prasarana untuk penyelenggaraan inkubator bisnis	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha
3.	Fasilitasi bantuan peralatan kepada inkubati	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan stimulus kepada calon wirausaha industri untuk memulai usahanya - Memberikan motivasi kepada calon wirausaha
4.	Fasilitasi pendampingan oleh tenaga ahli	Memberikan solusi dan saran bagi calon wirausaha industri dalam memulai usahanya
5.	Fasilitasi pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan akses pasar bagi calon wirausaha industri - Mengenalkan produk hasil usaha ke pasar
6.	Fasilitasi hubungan dengan lembaga pemodal	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan akses pembiayaan usaha dari lembaga pemodal

6. Promosi dan pemasaran

Kegiatan promosi dan pemasaran dilakukan oleh BDI agar masyarakat lebih mengenal keberadaan dan kiprah BDI. Materi promosi dan pemasaran dapat berupa informasi program kerja, fasilitas (*workshop* dan *teaching factory*), untuk pelaksanaan pelatihan dan program inkubator bisnis. Promosi dan pemasaran dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

Tabel 2. 6 Kegiatan promosi dan pemasaran BDI

No	Jenis Kegiatan	Manfaat
1.	Temu industri	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas jejaring kerja sama pelatihan BDI dengan perusahaan industri/asosiasi sesuai bidang spesialisasi dan kompetensi BDI - Mendapatkan tempat magang bagi widyaiswara dan pegawai BDI - Mendapatkan masukan dan informasi dalam pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi
2.	Pameran	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenalkan program kerja dan fasilitas yang dimiliki BDI - Memperluas jejaring kerja sama BDI
3.	Media cetak dan media elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenalkan program kerja dan fasilitas yang dimiliki BDI - Memperluas jejaring kerja sama BDI dengan pihak lain

7. Kerja sama dengan industri dan asosiasi

Kerja sama dengan industri dan asosiasi merupakan kunci penting agar BDI dapat menjadi lembaga pelatihan yang selalu *link and match* dengan industri. Bentuk kerja sama yang dapat dilakukan BDI dengan industri dan asosiasi meliputi:

Tabel 2. 7 Kegiatan kerjasama BDI

No	Kegiatan	Tujuan
1.	Pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi dan modul pelatihan berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan masukan dan informasi dalam pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi - Mendapatkan masukan dan informasi dalam pengembangan modul pelatihan berbasis kompetensi
2.	Rekrutmen peserta pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan calon tenaga kerja dari sekitar lingkungan perusahaan sehingga kesejahteraan masyarakat ikut meningkat
3.	Penyediaan tenaga instruktur dari industri	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian materi pelatihan kepada calon tenaga kerja lebih efektif dan sesuai kondisi pelaksanaan pekerjaan

No	Kegiatan	Tujuan
4.	Penempatan lulusan pelatihan pada perusahaan industri	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan industri mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bekerja - Pemberdayaan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5.	Fasilitasi tempat <i>On the job training</i> bagi peserta pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan tempat <i>On the Job Training</i> bagi peserta pelatihan untuk mempelajari keterampilan dan lingkungan pekerjaan di dunia industri

2.2 Rencana Kinerja

Sesuai dengan Rencana Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2016 yang disusun pada Agustus 2015, berikut sasaran yang akan dicapai pada tahun 2016 beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan:

Tabel 2.8 Rencana Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal	Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen
2	Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional	Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri	1359 Orang/tahun
		SDM aparatur yang kompeten	90 persen
		Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri	25 Orang/tahun
3	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan	Sertifikasi asesor	10 Orang
		Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)	1 TUK/tahun
4	Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf	Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja	1 Satker
5	Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional	Tingkat penyerapan anggaran	95 persen
6	Berkembangnya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional	Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat	90 persen
7	Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis	Penerapan sistem manajemen mutu	1 satuan Kerja

2.3 Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2016, Balai Diklat Industri Surabaya Kementerian Perindustrian mengelola anggaran sebesar **Rp 18.059.736.000,-** berupa kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri, dengan rencana anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rincian Anggaran Belanja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2016 (Data Awal)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
019.01.01	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	18.059.736.000
1830	Peningkatan Kualitas SDM Industri	18.059.736.000
1830.001	SDM Industri yang difasilitasi [Base Line]	96.668.000
1830.001.002	Terseleenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi	96.668.000
052	Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi	96.668.000
A	TPL Business Plan Penjurian [Angkatan 2011 (49 or x 1 keg)]	96.668.000
1830.002	Dokumen Infrastruktur Kompetensi [Base Line]	430.662.000
1830.002.001	Tersusunnya SKKNI Bidang Industri	250.240.000
051	Penyusunan SKKNI	250.240.000
A	Penyusunan SKKNI Elektronika	250.240.000
1830.002.002	Terfasilitasinya Pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Bidang Industri	41.860.000
052	Fasilitasi Pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi)	41.860.000
A	Pengelolaan LSP/TUK Garmen	41.860.000
1830.002.004	Tersusunnya Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi	138.562.000
054	Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi	138.562.000
A	Sistem Informasi Diklat (SIMDIK)	66.918.000
B	Penyusunan dan Pengembangan Program Diklat	71.644.000
1830.003	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan [Base Line]	895.060.000
1830.003.001	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi	377.880.000
051	Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi	377.880.000
A	Penyusunan Laporan Keuangan Instansi	37.044.000
B	Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah	10.960.000
C	LAKIP	6.410.000
D	Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran	34.060.000
E	Penyusunan RKAKL	95.262.000
F	Pengelolaan Administrasi Instansi	41.760.000
G	Rapat Konsultasi Pimpinan	92.360.000
H	Sistem Manajemen Mutu ISO	60.024.000
1830.003.002	Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan	517.180.000
052	Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan	517.180.000
A	Promosi, Monitoring dan Evaluasi Diklat	97.592.000

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
B	Konvensi 5 K	25.014.000
C	Rapat Kerja Dan Evaluasi BDI	345.090.000
D	Penyusunan Renkin dan Tapkin 2017	49.484.000
1830.004	SDM Aparatur Berbasis Kompetensi [Base Line]	839.634.000
1830.004.001	Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, dan Teknis Industri	761.922.000
051	Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri	761.922.000
A	Magang Ke Perusahaan Industri DN Bagi Pegawai	49.694.000
B	Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya	464.472.000
C	Sistem Industri I (25 org x 12 hr x 1 keg) Tahap Persiapan SI 1	9.416.000
D	Tahap Pelaksanaan SI 1	236.250.000
E	Evaluasi/Pelaporan SI 1	2.090.000
1830.004.003	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pengajar	77.712.000
055	Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar	77.712.000
A	Penulisan Karya Tulis Ilmiah	77.712.000
1830.005	SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi [Base Line]	8.820.000.000
1830.005.001	Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1	8.820.000.000
051	Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1	8.820.000.000
A	Diklat Garmen Angkatan 1 (80 Org x 21 Hari)	560.000.000
B	Diklat Garmen Angkatan 2 (80 Org x 21 Hari)	560.000.000
C	Diklat Garmen Angkatan 3 (80 Org x 21 Hari)	560.000.000
D	Diklat Garmen Angkatan 4 (80 Org x 21 Hari)	560.000.000
E	Diklat Garmen Angkatan 5 (80 Org x 21 Hari)	560.000.000
F	Diklat Garmen Angkatan 6 (80 Org x 21 Hari)	560.000.000
G	Diklat Garmen Angkatan 7 (80 Org x 21 Hari)	560.000.000
H	Diklat Garmen Angkatan 8 (80 Org x 21 Hari)	560.000.000
I	Diklat Garmen Angkatan 9 (80 Org x 21 Hari)	560.000.000
J	Diklat Garmen Angkatan 10 (80 Org x 21 Hr)	560.000.000
K	Diklat Garmen Angkatan 11 (80 Org x 21 Hr)	560.000.000
L	Diklat Garmen Angkatan 12 (80 Org x 21 Hr)	560.000.000
M	Diklat Elektronika Angkatan 1 (50 Org x 10 Hr)	300.000.000
N	Diklat Elektronika Angkatan 2 (50 Org x 10 Hr)	300.000.000
O	Diklat Elektronika Angkatan 3 (50 Org x 10 Hr)	300.000.000
P	Diklat Elektronika Angkatan 4 (50 Org x 10 Hr)	300.000.000
Q	Diklat Elektronika Angkatan 5 (50 Org x 10 Hr)	300.000.000
R	Diklat Elektronika Angkatan 6 (50 Org x 10 Hr)	300.000.000
S	Diklat Elektronika Angkatan 7 (50 Org x 10 Hr)	300.000.000
1830.006	Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi [Base Line]	2.339.342.000
1830.006.001	Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.004.342.000
008	Gedung dan Bangunan	2.004.342.000

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
A	Renovasi Gedung Kantin, Penambahan ACP dan Selasar (800 m2)	2.004.342.000
1830.006.002	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	335.000.000
007	Peralatan dan Mesin	335.000.000
A	Ruang Workshop Diklat Garmen	160.000.000
B	Ruang Workshop Diklat Elektronika	175.000.000
1830.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	4.638.370.000
1830.994.001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.479.740.000
001	Gaji dan Tunjangan	2.479.740.000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.479.740.000
1830.994.002	Terseleenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	2.158.630.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.158.630.000
A	Pengelola DIPA	118.080.000
B	Layanan Daya dan Jasa	276.000.000
C	Operasional Perkantoran Sehari-hari	727.020.000
D	Perawatan Sarana dan Prasarana Diklat	1.037.530.000

2.4 Dokumen Perjanjian Kinerja

Berikut ini adalah perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat Industri Surabaya dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian pada tanggal 5 Januari 2016:

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)			
1	Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal	Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen
2	Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional	Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri	1359 Orang/tahun
		SDM aparatur yang kompeten	90 persen
		Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri	25 Orang/tahun
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)			

1	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan	Sertifikasi asesor	10 Orang
		Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)	1 TUK/tahun
2	Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf	Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja	1 Satker
3	Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional	Tingkat penyerapan anggaran	95 persen
4	Berkembangnya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional	Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat	90 persen
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)			
1	Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis	Penerapan sistem manajemen mutu	1 satuan Kerja

Jumlah Anggaran:

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri (Rp. 18.059.736.000,-)

Kepala Pusdiklat Industri

ttd

Drs. Mujiyono, MM

Surabaya, 05 Januari 2016

Kepala BDI Surabaya

ttd

Yulius Sarjono Eddy, SE, MM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pencapaian kinerja yang dilakukan Balai Diklat Industri Surabaya berdasarkan Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2016			SATUAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)						
1	Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal	Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85	83,33	98,04	Persen
2	Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional	Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri	1359	1409	103,68	Orang/ tahun
		SDM aparatur yang kompeten	90	100	111,11	persen
		Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri	25	0	0,00	Orang/ tahun
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)						
1	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan	Sertifikasi asessor	10	4	40,00	Orang
		Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)	1	1	100,00	TUK/ Tahun
2	Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf	Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja	1	1	100,00	Satker
3	Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional	Tingkat penyerapan anggaran	95	97,63	102,77	Persen
4	Berkembangnya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional	Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat	90	0	0,00	Persen
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)						
1	Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis	Penerapan sistem manajemen mutu	1	1	100,00	Satuan Kerja

Sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016, kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2016 mencakup 2 (dua) sasaran strategis dalam perspektif **Pemangku Kepentingan (Stakeholder)** yang diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja (IK), 4 (empat) sasaran strategis dalam perspektif **Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (IT)** yang diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja (IK), 1 (satu) sasaran strategis dalam perspektif **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan** yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja (IK). Berikut pembahasan capaian kinerja per sasaran strategis:

1. Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja:

- a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dengan target tahun 2016 sebesar 85 persen.

Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan diukur melalui penghitungan jumlah revisi anggaran yang dilakukan.

Untuk perencanaan tahun 2016, telah dilaksanakan penelitian dan reviu oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal mengenai perencanaan tahun anggaran 2016. Namun dari hasil penelitian dan reviu pada tahun 2015 masih belum bisa disimpulkan dalam suatu ukuran kuantitatif.

Dalam rangka meminimalisir anggaran yang diblokir, mewujudkan sinergi dan sinkronisasi program Peningkatan Kualitas SDM tahun anggaran 2016 serta Koordinasi Pelaksanaan program tahun anggaran 2016 agar sesuai dengan perencanaan awal telah melaksanakan Rapat Kerja BDI Surabaya di Bali tanggal 4 Februari 2016; telah melakukan rapat koordinasi terkait pemotongan anggaran pada bulan Juli 2016; telah melakukan rapat koordinasi terkait pemblokiran anggaran pada bulan Agustus 2016.

Revisi DIPA yang dilakukan Balai Diklat Industri Surabaya pada tahun anggaran 2016 sebanyak 4 kali. Revisi pertama dilakukan untuk menambah alokasi anggaran belanja Jasa Daya Listrik. Revisi ke-2 dikarenakan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp 1.356.000.000,00 sehingga mengakibatkan Pagu anggaran berkurang. Revisi ke-3 dilakukan karena adanya pemblokiran anggaran sebesar Rp. 249.000.000,00. Revisi ke-4 dilakukan karena adanya pagu minus pada belanja pegawai.

Adapun kendala dari luar yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan awal adalah adanya Pemotongan anggaran sebesar 1,356 M dan pemblokiran sebesar 247 juta.

Tabel. 3.1.1. Target dan Realisasi Tahun 2016 IK dari Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal

NO	SASARAN STRATEGIS	IK	2016			SATUAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal	Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85	83,33	98,04	Persen

Sumber: BDI Surabaya

Balai Diklat Industri Surabaya melakukan revisi anggaran sebanyak 4 kali, 2 dikarenakan faktor eksternal dan 2 dikarenakan faktor internal.

Faktor Eksternal karena adanya pemotongan anggaran sebesar 1,356 M yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2016 dan pemblokiran anggaran sebesar 247 juta yang dilakukan pada tanggal 30 September 2016.

Faktor Internal dikarenakan adanya kekurangan anggaran belanja Daya Listrik dan telah direvisi pada tanggal 30 Mei 2016 serta Pagu Minus Belanja Pegawai dan telah direvisi pada tanggal 11 November 2016

Tabel. 3.1.2. Capaian IK dari Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal

NO	SASARAN STRATEGIS	IK	2015	2016	SATUAN
1	Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal	Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	88,24	98,04	Persen

Sumber: BDI Surabaya

Pada tahun 2015 dilakukan Revisi DIPA sebanyak 4 kali, hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan (pemotongan dan penambahan anggaran) serta perubahan Output diklat 3 in 1.

Sebagai langkah perbaikan sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal, Pada Tahun 2015 telah dilakukan rapat koordinasi dengan melibatkan

seluruh Penanggung jawab/Koordinator Kegiatan membahas perencanaan kegiatan tahun anggaran 2016 agar kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan.

Tabel. 3.1.3. Realisasi IK dari Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal

NO	SASARAN STRATEGIS	IK	2015	2016	SATUAN
1	Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal	Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	75	83,33	Persen

Sumber: BDI Surabaya

2. Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja :

- a. Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri dengan target tahun 2016 sebesar 1359 Orang/Tahun.
- b. SDM aparatur yang kompeten dengan target tahun 2016 sebesar 90 persen
- c. Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri dengan target tahun 2016 sebesar 25 Orang/tahun

➤ **Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri** diukur melalui penghitungan jumlah alumni diklat yang dilaksanakan di BDI Surabaya.

Kegiatan Diklat 3 in 1 yang dilaksanakan oleh BDI Surabaya tahun 2016 adalah diklat garmen dan elektronika. Adapun tujuan dan manfaat mengadakan diklat adalah Peserta diklat memiliki keterampilan dan pengetahuan, serta bekerja di industri. Kendala dari pelaksanaan diklat ini adalah Evaluasi penempatan peserta masih belum dapat dilakukan secara berkesinambungan. Namun kegiatan ini perlu dilaksanakan terus untuk mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan daya saing industri.

Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi meliputi : Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi sebanyak 13 Angkatan; Diklat Operator Elektronika sebanyak 8 Angkatan;

Tabel. 3.2.1 Pelaksanaan Diklat 3 in 1 BDI Surabaya tahun 2016

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta (Orang)	Jumlah Peserta Uji Kompetensi	Jumlah Peserta Lulus Uji Kompetensi	Penempatan	
						Jumlah (Orang)	Perusahaan
Balai Diklat Industri Surabaya							
1	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Garmen Angkatan 1	14 Januari s.d. 2 Februari 2016 (20 hari kalender)	81	81	81	81	PT. Sri Tex Solo
2	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Garmen Angkatan 2	11 Februari s.d. 1 Maret 2016 (20 hari kalender)	80	80	79	80	PT. Sri Tex Solo
3	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Garmen Angkatan 3	18 Februari s.d. 8 Maret 2016 (20 hari kalender)	75	75	75	75	-PT. Sri Tex Solo (66 Org) - Fash Konveksi dan Tailor (9 Org)
4	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Garmen Angkatan 4	3 s.d. 22 Maret 2016 (20 hari kalender)	74	74	74	74	PT. Sri Tex Solo
5	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Garmen Angkatan 5	10 s.d. 29 Maret 2016 (20 hari kalender)	80	80	79	80	- PT. Sri Tex Solo (62 Org) - Arisma Konveksi (18 Org)
6	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Garmen Angkatan 6	24 Maret s.d. 12 April 2016 (20 hari kalender)	67	67	67	67	PT. Sri Tex Solo
7	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Garmen Angkatan 7	14 April s.d. 3 Mei 2016 (20 hari kalender)	80	80	80	80	PT. Sri Tex Solo
8	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Garmen Angkatan 8	15 April s.d. 4 Mei 2016 (20 hari kalender)	80	80	61	80	PT. Sri Tex Solo
9	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Garmen Angkatan 9	11 s.d. 30 Mei 2016 (20 hari kalender)	80	80	47	80	PT. Sri Tex Solo
10	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Garmen Angkatan 10	13 s.d. 1 Juni 2016 (20 hari kalender)	78	78	45	78	PT. Sri Tex Solo
11	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Garmen Angkatan 11	22 Juli s.d. 10 Agustus 2016 (20 hari kalender)	80	80	49	80	PT. Sri Tex Solo
12	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Garmen Angkatan 12	5 s.d. 24 Agustus 2016 (20 hari kalender)	81	81	47	81	PT. Sri Tex Solo
13	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Garmen Angkatan 13	19 Agustus s.d. 7 September 2016 (20 hari kalender)	74	74	71	74	PT. Sri Tex Solo
14	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Elektronika Angkatan 1	16 s.d. 25 Februari 2016 (10 hari kalender)	50	0	-	50	PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia
15	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Elektronika Angkatan 2	26 Februari s.d. 6 Maret 2016 (10 hari kalender)	50	0	-	50	PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia
16	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Elektronika Angkatan 3	14 s.d. 23 Maret 2016 (10 hari kalender)	50	0	-	50	PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia
17	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Elektronika Angkatan 4	11 s.d. 20 April 2016 (10 hari kalender)	50	0	-	50	PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia
18	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Elektronika Angkatan 5	25 April s.d. 4 Mei 2016 (10 hari kalender)	50	0	-	50	PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia
19	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Elektronika Angkatan 6	10 s.d. 19 Mei 2016 (10 hari kalender)	50	0	-	50	PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia
20	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Elektronika Angkatan 7	26 Mei s.d. 4 Juni 2016 (10 hari kalender)	49	0	-	49	PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia
21	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Industri Elektronika Angkatan 8	6 s.d. 15 Juni 2016 (10 hari kalender)	50	0	-	50	PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia
TOTAL			1409	1010	855	1409	

Sumber: BDI Surabaya

- **SDM aparatur yang kompeten** diukur melalui penghitungan jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan diklat/magang untuk meningkatkan kompetensinya.

Tahun 2016 BDI Surabaya melaksanakan kegiatan Magang Industri bagi Pegawai ke PT Varia Usaha Beton, Sidoarjo apada bulan Juli 2016. Kegiatan ini diikuti oleh 4 orang pegawai BDI Surabaya. Kegiatan magang merupakan salah satu usaha untuk menggali informasi dengan cara terjun langsung ke lapangan pada bidang yang bersangkutan sehingga dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang riil bagi pelaksananya.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan, memantapkan, dan memperluas wawasan pegawai baru Kementerian Perindustrian tentang berbagai

aspek yang berkaitan dengan dunia industri sebagai bekal untuk memasuki lingkungan kerja yang sesungguhnya; Memberikan pengalaman bagi pegawai baru tentang aspek-aspek berusaha antara lain meliputi aspek Organisasi dan Manajemen, Sistem Pemasaran, Sistem Produksi dan Operasional Usaha Industri; Memberikan gambaran tentang permasalahan di bidang industri sebagai masukan bagi pegawai baru maupun bagi para pengambil kebijakan industri

- **Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri** diukur melalui penghitungan jumlah SDM aparatur yang mengikuti kegiatan diklat bagi aparatur seperti diklat Sistem Industri.

Diklat Sistem Industri memiliki manfaat :

- Menyamakan persepsi bagi aparatur industri daerah mengenai teknis substansi industri yang dituangkan dalam kebijakan industri.
- Meningkatkan pengetahuan, kompetensi, daya inovasi, dan keterampilan para aparatur dan pelaku usaha dalam bidang teknis, dengan harapan para aparatur dapat memberikan pembinaan dan bimbingan yang profesional dan memperhatikan hal-hal yang strategis bagi IKM binaannya

Rencananya tahun 2016 akan melaksanakan diklat Sistem Industri I dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang berasal dari aparat daerah seluruh Indonesia. Namun karena anggaran yang semula dialokasikan untuk kegiatan diklat Sistem Industri ini terpotong, maka pelaksanaan diklat ini tidak dapat terlaksana.

Tabel. 3.2.2. Target dan Realisasi Tahun 2016 **SDM industri dan aparatur yang profesional**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	2016			SATUAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
2	Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional	Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri	1359	1409	103,68	Orang/tahun
		SDM aparatur yang kompeten	90	100	111,11	persen
		Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri	25	0	0,00	Orang/tahun

Sumber: BDI Surabaya

Tabel. 3.2.3. Capaian **SDM industri dan aparatur yang profesional**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	2013	2014	2015	2016	SATUAN
2	Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional	Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri	100,00	98,33	97,86	103,68	Persen
		SDM aparatur yang kompeten	150,00	0,00	100,00	100,00	Persen
		Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri	100,00	100,00	88,00	0,00	Persen

Sumber: BDI Surabaya

Tabel. 3.2.4. Realisasi **SDM industri dan aparatur yang profesional**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	2013	2014	2015	2016	SATUAN
2	Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional	Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri	400	885	1233	1409	Orang/tahun
		SDM aparatur yang kompeten	6	0	4	4	persen
		Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri	25	50	22	0	Orang/tahun

Sumber: BDI Surabaya

Balai Diklat Industri Surabaya, mulai mengadakan diklat three in one pada tahun 2013 dengan target Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri sebesar 400 orang, dan mulai meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Penempatan lulusan ini ditempatkan di KUB-KUB yang telah bekerjasama dengan BDI Surabaya, PT. Berkat Ganda Sentosa, PT. PAN Brothers, PT. Prima Line, Int, CV. Riva Garment, dan PT Dan Liris.

Pada tahun 2014 BDI Surabaya mempunyai target Lulusan Pelatihan three in one sebesar 900, namun hanya terealisasi sebesar 885 orang atau sebesar 98.33% dengan penempatan peserta di PT Dan Liris, PT. Prima Line, Int, PT Vinsa Mandiri Utama, Ma'arif Sport, CV Master Mats, Sanggar Busana Cahaya, UD. Zuhair Bobsaid, PT. PAN Brothers.

Pada tahun 2015 BDI Surabaya mempunyai target Lulusan Pelatihan three in one sebesar 1.260, namun hanya terealisasi sebesar 1.233 orang atau sebesar 97.86% dengan penempatan peserta di PT. PAN Brothers, PT. Angkasa Indahabadi, PT Vinsa Mandiri Utama, PT Dan Liris, PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia, PT.



Prime Line Int,PT. Ladewindo Garment Manufacturer,PT Polaris Garment ,PT. Jaya Asri Garmindo, PT. Sritex.

Pada tahun 2016 BDI Surabaya mempunyai target Lulusan Pelatihan three in one sebesar 1.359, namun hanya terealisasi sebesar 1.409 orang atau sebesar 103.68% dengan penempatan peserta di PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia, PT. Sritex, Fash Konveksi dan Tailor, Arisma Konveksi.

Untuk meningkatkan, memantapkan, dan memperluas wawasan bagi pegawai di industri, Balai Diklat Industri Surabaya telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti magang industri, pada tahun 2013 sebanyak 6 orang di PT Semen Indonesia, Tbk, pada tahun 2015 sebanyak 4 orang di PT PAL Indonesia dan pada tahun 2016 sebanyak 4 orang di PT Varia Usaha Beton.

Sedangkan pelaksanaan Diklat Sistem Industri pada tahun 2016 tidak dapat terlaksana dikarenakan terkena pemotongan anggaran. Dari tahun-tahun sebelumnya Balai Diklat Industri Surabaya selalu melaksanakan Diklat Sistem Industri, pada tahun 2013 Diklat Sistem Industri I dengan jumlah peserta 25 orang, pada tahun 2014 Diklat Sistem Industri I dan Diklat Sistem Industri II dengan peserta sebanyak 25 orang pada masing-masing diklat, Tahun 2015 Diklat Sistem Industri I dengan jumlah peserta 22 orang.

3. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja:

- a. Sertifikasi asesor dengan target tahun 2016 sebesar 10 Orang
- b. Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan target tahun 2016 sebesar 1 TUK/tahun

➤ **Sertifikasi asesor** diukur melalui penghitungan jumlah SDM aparatur yang mempunyai sertifikat kompeten.

Pada tahun 2016 BDI Surabaya telah mengikutkan pegawai sebanyak 4 orang untuk mengikuti diklat asesor kompetensi. Kegiatan diklat ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme BDI Surabaya dalam melaksanakan diklat berbasis kompetensi. Tenaga pengajar pelatihan BDI dapat berasal dari widyaiswara, instruktur, praktisi industri dan asosiasi industri/profesi ataupun narasumber lain yang memiliki kompetensi sesuai. Kompetensi dimaksud berupa: (1) kompetensi teknis sesuai spesialisasi yang diajarkan; serta (2) kompetensi metodologi

pengajaran. Untuk melengkapi kompetensi metodologi pengajaran tersebut, BDI dapat menyelenggarakan *Training Of Trainer* (TOT) bagi calon tenaga pengajarnya.

BDI Surabaya sampai saat ini sudah memiliki 17 pegawai yang memiliki sertifikat asesor kompeten metodologi dan 2 pegawai yang memiliki sertifikat asesor kompeten bidang.

- **Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)** diukur melalui penghitungan jumlah Jumlah TUK yang dibentuk oleh BDI Surabaya.

Dalam rangka melaksanakan program Pemerintah di bidang industri perlu dipersiapkan tenaga kerja industri yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang elektronika. Pada Tahun 2016, BDI Surabaya membentuk Tempat Uji Kompetensi sektor Elektronika berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Surabaya Nomor 605.1/SJ.IND.6.22/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Tempat Uji Kompetensi Bidang Elektronika BDI Surabaya.

Untuk dapat dijadikan sebagai TUK, BDI telah melengkapi sarana prasaranya hingga mampu merepresentasikan kondisi tempat kerja yang sesungguhnya. Namun karena adanya pemotongan anggaran, TUK bidang elektronika BDI Surabaya belum dilakukan verifikasi oleh LSP P3 elektronika

Namun tahun 2017 diharapkan Pelaksanaan uji kompetensi sudah dilakukan oleh asesor kompetensi di TUK elektronika BDI Surabaya. Asesor kompetensi pada LSP BDI dapat berasal dari tenaga pengajar BDI (widyaiswara) atau praktisi industri yang memiliki kompetensi teknis terkait serta kompetensi metodologi pengujian.

Tabel. 3.3.1. Target dan Realisasi Tahun 2016 **kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	2016			SATUAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan	Sertifikasi asessor	10	4	40,00	Orang
		Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)	1	1	100,00	TUK/Tahun

Sumber: BDI Surabaya

Tabel. 3.3.2. Capaian IK kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	2013	2014	2015	2016	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan	Sertifikasi asessor	137,50	0,00	100,00	100,00	Persen
		Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)	-	-	100,00	100,00	Persen

Sumber: BDI Surabaya

Tabel. 3.3.3. Realisasi IK kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	2013	2014	2015	2016	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan	Sertifikasi asessor	11	-	5	4	Orang
		Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)	-	-	1	1	TUK/Tahun

Sumber: BDI Surabaya

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme BDI Surabaya dalam melaksanakan diklat berbasis kompetensi, Balai Diklat Industri Surabaya telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat Asesor. Pada tahun 2013 sebanyak 11 pegawai BDI Surabaya telah memiliki sertifikat kompetensi metodologi dan 2 orang telah memiliki sertifikat kompetensi bidang. Pada tahun 2015 sebanyak 5 pegawai BDI Surabaya telah memiliki sertifikat kompetensi metodologi. Pada tahun 2016 sebanyak 4 pegawai BDI Surabaya telah memiliki sertifikat kompetensi metodologi.

Pada tahun 2015, BDI Surabaya telah mempunyai TUK bidang Garmen dan telah melaksanakan uji kompetensi bidang garmen untuk peserta diklat operator garmen BDI Surabaya. Sedangkan pada tahun 2016 BDI Surabaya akan membentuk TUK bidang Elektronika sehingga BDI Surabaya dapat melaksanakan uji kompetensi bidang elektronika.

4. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:

- a. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja dengan target tahun 2016 sebesar 1 Satker.

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja diukur melalui penghitungan sudah terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja .

Balai Diklat Industri Surabaya telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern pada tahun 2016. BDI Surabaya telah mempunyai Satgas SPIP Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 170/M-IND/Kep/3/2016 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Surabaya tanggal 21 Maret 2016.

Adapun tugas dan tanggung jawab Satgas SPIPI BDI Surabaya adalah :

- Membimbing, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan SPIP di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Surabaya
- Menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Surabaya
- Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Surabaya
- Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan SPIP di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Surabaya kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Surabaya

Adapun susunan keanggotaan Satgas SPIP BDI Surabaya adalah :

Ketua merangkap anggota : Retna Erry Triana, SH

Anggota : Faizi Rizky Amalia, S.Sn

Tabel. 3.4.1. Target dan Realisasi Tahun 2016 IK dari Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

NO	SASARAN STRATEGIS	IK	2016			SATUAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf	Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja	1	1	100,00	Satker

Sumber: BDI Surabaya

Tabel. 3.4.2. Capaian IK dari Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

NO	SASARAN STRATEGIS	IK	2013	2014	2015	2016	SATUAN
1	Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf	Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja	-	-	-	100,00	Persen

Sumber: BDI Surabaya

Tabel. 3.4.3. Realisasi IK dari Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

NO	SASARAN STRATEGIS	IK	2013	2014	2015	2016	SATUAN
1	Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf	Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja	-	-	-	1	Satker

Sumber: BDI Surabaya

5. Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:

- Tingkat penyerapan anggaran dengan target tahun 2016 sebesar 95 Persen.

Tingkat penyerapan anggaran diukur melalui penghitungan realisasi anggaran yang diserap oleh BDI Surabaya.

Pada awal tahun 2016, Balai Diklat Industri Surabaya mengelola anggaran sebesar **Rp 18.059.736.000,-** berupa kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Namun, pada bulan Juli tahun 2016 terkena penghematan anggaran sebesar Rp. 1.356.000.000,00 sehingga pada tanggal 9 Agustus 2016 terbitlah DIPA baru dengan anggaran sejumlah **Rp. 16.703.736.000,00**. Dari total pagu yang baru tersebut, pada tanggal 30 September 2016 diblokir sebesar Rp. 247.000.000,00. Dan sampai Desember 2016 Balai Diklat Industri Surabaya telah merealisasikan anggaran sebesar Rp **16.307.105.727,00** (97,63%).

Tabel. 3.5.1. Target dan Realisasi Tahun 2016 IK dari Tingkat penyerapan anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	IK	2016			SATUAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional	Tingkat penyerapan anggaran	95	97,63	102,77	Persen

Sumber: BDI Surabaya

Tabel. 3.5.2. Capaian IK dari Tingkat penyerapan anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	IK	2013	2014	2015	2016	SATUAN
1	Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional	Tingkat penyerapan anggaran	103,15	102,81	103,14	102,77	Persen

Sumber: BDI Surabaya

Tabel. 3.5.3. Realisasi IK dari Tingkat penyerapan anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	IK	2013	2014	2015	2016	SATUAN
1	Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional	Tingkat penyerapan anggaran	97,99	97,67	97,98	97,63	Persen

Sumber: BDI Surabaya

Selama empat tahun terakhir Balai Diklat Industri Surabaya dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri mempunyai penyerapan anggaran rata-rata sebesar 97,82%.

6. Berkembangnya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang professional

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:

- Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat dengan target tahun 2016 sebesar 90 Persen.

Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat diukur melalui penghitungan jumlah diklat telah sesuai dengan SKKNI dan modul diklat.

Rencananya tahun 2016 BDI Surabaya akan menyusun SKKNI bidang garmen sehingga diklat garmen yang dilaksanakan oleh BDI Surabaya sesuai dengan standar kompetensi SKKNI. Namun karena anggaran yang semula dialokasikan untuk kegiatan penyusunan SKKNI ini terkena pemblokiran, maka pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat terlaksana.

Tabel. 3.6.1. Target dan Realisasi Tahun 2016 IK dari Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat

NO	SASARAN STRATEGIS	IK	2016			SATUAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Berkembangnya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional	Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat	90	0	0,00	Persen

Sumber: BDI Surabaya

Tabel. 3.6.2. Capaian IK dari Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat

NO	SASARAN STRATEGIS	IK	2013	2014	2015	2016	SATUAN
1	Berkembangnya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional	Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat	-	-	-	0,00	Persen

Sumber: BDI Surabaya

Tabel. 3.6.3. Realisasi IK dari Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	2013	2014	2015	2016	SATUAN
1	Berkembangnya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional	Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat	-	-	-	0	Persen

Sumber: BDI Surabaya

7. Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:

- Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis dengan target tahun 2016 sebesar 1 Satker.

Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis diukur melalui penghitungan pelaksanaan penerapan sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Pada Tahun 2016 dalam menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 telah melakukan rapat-rapat koordinasi, audit internal terhadap BDI Surabaya, audit eksternal terhadap BDI Surabaya oleh Lembaga asesmen independen (TUV Reinland).

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk menertibkan administrasi, melakukan perbaikan yang berkesinambungan dan meningkatkan kinerja manajemen Balai Diklat Industri Surabaya. Dalam mewujudkan peningkatan budaya perbaikan berkesinambungan, pada tahun 2017 BDI Surabaya harus sudah melakukan upgrading Standar Mutu Manajemen ISO 9001:2015.

Tabel. 3.7.1. Target dan Realisasi Tahun 2016 IK dari Penerapan sistem manajemen mutu

NO	SASARAN STRATEGIS	IK	2016			SATUAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis	Penerapan sistem manajemen mutu	1	1	100,00	Satuan Kerja

Sumber: BDI Surabaya

Tabel. 3.7.2. Capaian IK dari Penerapan sistem manajemen mutu

NO	SASARAN STRATEGIS	IK	2013	2014	2015	2016	SATUAN
1	Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis	Penerapan sistem manajemen mutu	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen

Sumber: BDI Surabaya

Tabel. 3.7.3. Realisasi IK dari Penerapan sistem manajemen mutu

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	2013	2014	2015	2016	SATUAN
1	Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis	Penerapan sistem manajemen mutu	1	1	1	1	Satuan Kerja

Sumber: BDI Surabaya

3.2 Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2016, Balai Diklat Industri Surabaya mengelola anggaran sebesar **Rp 18.059.736.000,-** berupa kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Namun, pada bulan Juli tahun 2016 terkena penghematan anggaran sebesar Rp. 1.356.000.000,00 sehingga pada tanggal 9 Agustus 2016 terbitlah DIPA baru dengan anggaran sejumlah **Rp. 16.703.736.000,00**. Dari total pagu yang baru tersebut, pada tanggal 30 September 2016 diblokir sebesar Rp. 247.000.000,00. Dan sampai Desember 2016 Balai Diklat Industri Surabaya telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp 16.307.105.727,00 (97,63%)**. Realisasi ini turun 0,35% dari realisasi anggaran tahun 2015. Namun jika dihitung berdasarkan pagu anggaran tanpa blokir yaitu sebesar **Rp. 16.456.736.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 16.307.105.727,00** maka besarnya prosentase realisasi anggaran Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2016 sebesar **99,09 %**.

Tabel 3.2 Rincian Anggaran Belanja Balai Diklat Industri Surabaya 2016 (E-Monitoring Final)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI		SISA
			TOTAL	%	
1	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	16.703.736.000	16.307.105.727	97,63	396.630.273
1830	Peningkatan Kualitas Sdm Industri	16.703.736.000	16.307.105.727	97,63	396.630.273
1.830.001	Sdm Industri Yang Difasilitasi	96.668.000	96.668.000	100	0
2	Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi	96.668.000	96.668.000	100	0
52	Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi	96.668.000	96.668.000	100	0
A	Tpl Business Plan Penjurian [angkatan 2011 (49 Or X 1 Keg)]	96.668.000	96.668.000	100	0
1.830.002	Dokumen Infrastruktur Kompetensi	142.722.000	126.918.000	88,93	15.804.000
2	Terfasilitasinya Pembentukan Lsp (lembaga Sertifikasi Profesi) Bidang Industri	41.860.000	37.500.000	89,58	4.360.000
52	Fasilitasi Pembentukan Lsp (lembaga Sertifikasi Profesi)	41.860.000	37.500.000	89,58	4.360.000
A	Pengelolaan Lsp/tuk Garmen	41.860.000	37.500.000	89,58	4.360.000
4	Tersusunnya Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi	100.862.000	89.418.000	88,65	11.444.000
54	Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100.862.000	89.418.000	88,65	11.444.000
A	Sistem Informasi Diklat (simdik)	29.218.000	22.550.000	77,18	6.668.000
B	Penyusunan Dan Pengembangan Program Diklat	71.644.000	66.868.000	93,33	4.776.000
1.830.003	Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan	769.902.000	729.904.300	94,8	39.997.700
1	Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi	336.206.000	311.263.600	92,58	24.942.400
51	Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi	336.206.000	311.263.600	92,58	24.942.400
A	Penyusunan Laporan Keuangan Instansi	15.260.000	11.900.000	77,98	3.360.000
B	Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah	10.960.000	8.600.000	78,47	2.360.000
C	Lakip	6.410.000	4.050.000	63,18	2.360.000
D	Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran	34.060.000	31.700.000	93,07	2.360.000
E	Penyusunan Rkaki	75.372.000	72.566.600	96,28	2.805.400
F	Pengelolaan Administrasi Instansi	41.760.000	39.400.000	94,35	2.360.000
G	Rapat Konsultasi Pimpinan	92.360.000	83.250.000	90,14	9.110.000
H	Sistem Manajemen Mutu Iso	60.024.000	59.797.000	99,62	227.000
2	Tersusunnya Laporan Program Dan Kegiatan	433.696.000	418.640.700	96,53	15.055.300
52	Penyusunan Dokumen Program Dan Kegiatan	433.696.000	418.640.700	96,53	15.055.300
A	Promosi, Monitoring Dan Evaluasi Diklat	97.592.000	88.099.800	90,27	9.492.200

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI		SISA
			TOTAL	%	
B	Konvensi 5 K	25.014.000	19.620.300	78,44	5.393.700
C	Rapat Kerja Dan Evaluasi Bdi	311.090.000	310.920.600	99,95	169.400
1.830.004	Sdm Aparatur Berbasis Kompetensi	571.878.000	470.535.823	82,28	101.342.177
1	Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, Dan Teknis Industri	514.166.000	470.535.823	91,51	43.630.177
51	Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri	514.166.000	470.535.823	91,51	43.630.177
A	Magang Ke Perusahaan Industri Dn Bagi Pegawai	49.694.000	38.794.000	78,07	10.900.000
B	Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya	464.472.000	431.741.823	92,95	32.730.177
3	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pengajar	57.712.000	0	0	57.712.000
55	Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar	57.712.000	0	0	57.712.000
A	Penulisan Karya Tulis Ilmiah	57.712.000	0	0	57.712.000
1.830.005	Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi	8.052.000.000	8.017.479.884	99,57	34.520.116
1	Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1	8.052.000.000	8.017.479.884	99,57	34.520.116
51	Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1	8.052.000.000	8.017.479.884	99,57	34.520.116
A	Diklat Garmen Angkatan 1 (80 Org X 20 Hari)	479.850.000	479.808.339	99,99	41.661
B	Diklat Garmen Angkatan 2 (80 Org X 20 Hari)	478.850.000	478.814.400	99,99	35.600
C	Diklat Garmen Angkatan 3 (80 Org X 20 Hari)	471.900.000	471.806.300	99,98	93.700
D	Diklat Garmen Angkatan 4 (80 Org X 20 Hari)	466.500.000	466.433.045	99,99	66.955
E	Diklat Garmen Angkatan 5 (80 Org X 20 Hari)	477.350.000	477.296.700	99,99	53.300
F	Diklat Garmen Angkatan 6 (80 Org X 20 Hari)	459.650.000	459.576.300	99,98	73.700
G	Diklat Garmen Angkatan 7 (80 Org X 20 Hari)	479.900.000	479.857.600	99,99	42.400
H	Diklat Garmen Angkatan 8 (80 Org X 20 Hari)	479.600.000	479.563.300	99,99	36.700
I	Diklat Garmen Angkatan 9 (80 Org X 20 Hari)	479.650.000	479.614.000	99,99	36.000
J	Diklat Garmen Angkatan 10 (80 Org X 20 Hari)	475.400.000	475.385.700	100	14.300
K	Diklat Garmen Angkatan 11 (80 Org X 20 Hari)	478.650.000	478.592.800	99,99	57.200
L	Diklat Garmen Angkatan 12 (80 Org X 20 Hari)	477.700.000	477.591.000	99,98	109.000
M	Diklat Garmen Angkatan 13 (80 Org X 20 Hari)	474.050.000	441.967.500	93,23	32.082.500
O	Diklat Elektronika Angkatan 1 (50 Org X 10 Hr)	222.750.000	222.733.500	99,99	16.500
P	Diklat Elektronika Angkatan 2 (50 Org X 10 Hr)	222.290.000	222.263.000	99,99	27.000
Q	Diklat Elektronika Angkatan 3 (50 Org X 10 Hr)	222.340.000	222.323.500	99,99	16.500
R	Diklat Elektronika Angkatan 4 (50 Org X 10 Hr)	223.000.000	222.973.000	99,99	27.000
S	Diklat Elektronika Angkatan 5 (50 Org X 10 Hr)	221.350.000	221.327.700	99,99	22.300

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI		SISA
			TOTAL	%	
T	Diklat Elektronika Angkatan 6 (50 Org X 10 Hr)	222.550.000	222.541.000	100	9.000
U	Diklat Elektronika Angkatan 7 (50 Org X 10 Hr)	221.000.000	220.981.700	99,99	18.300
V	Diklat Elektronika Angkatan 8 (50 Org X 10 Hr)	222.350.000	222.329.500	99,99	20.500
W	Diklat Peningkatan Kompetensi Pegawai Bdi Surabaya	95.320.000	93.700.000	98,3	1.620.000
1.830.006	Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.194.342.000	2.189.549.700	99,78	4.792.300
1	Pembangunan Gedung/bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1.924.342.000	1.923.876.900	99,98	465.100
8	Gedung Dan Bangunan	1.924.342.000	1.923.876.900	99,98	465.100
A	Renovasi Gedung Kantin, Penambahan Acp Dan Selasar (800 M2)	1.924.342.000	1.923.876.900	99,98	465.100
2	Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	270.000.000	265.672.800	98,4	4.327.200
7	Peralatan Dan Mesin	270.000.000	265.672.800	98,4	4.327.200
A	Ruang Workshop Diklat Garmen	160.000.000	158.422.800	99,01	1.577.200
B	Ruang Workshop Diklat Elektronika	110.000.000	107.250.000	97,5	2.750.000
1.830.994	Layanan Perkantoran	4.876.224.000	4.676.050.020	95,89	200.173.980
1	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	2.479.740.000	2.425.617.801	97,82	54.122.199
1	Gaji Dan Tunjangan	2.479.740.000	2.425.617.801	97,82	54.122.199
A	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	2.479.740.000	2.425.617.801	97,82	54.122.199
2	Terseleenggaranya Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	2.396.484.000	2.250.432.219	93,91	146.051.781
2	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	2.396.484.000	2.250.432.219	93,91	146.051.781
A	Pengelola Dipa	98.640.000	98.640.000	100	0
B	Layanan Daya Dan Jasa	433.800.000	393.958.957	90,82	39.841.043
C	Operasional Perkantoran Sehari-hari	792.960.000	788.583.006	99,45	4.376.994
D	Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat	1.071.084.000	969.250.256	90,49	101.833.744
	TOTAL	16.703.736.000	16.307.105.727	97,63	396.630.273

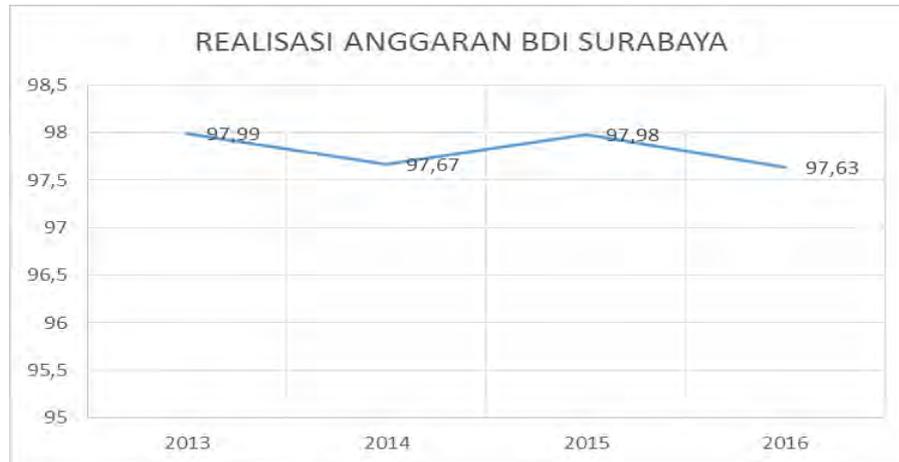
Sumber: BDI Surabaya

Tidak optimalnya tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2016 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Adanya penghematan/pemotongan anggaran sebesar Rp 1.356.000.000,00 menyebabkan rencana kegiatan diklat tidak sesuai perencanaan dan mempengaruhi kegiatan lainnya misalnya Belanja Layanan Daya dan Jasa listrik yang sebelumnya sudah diperhitungkan sampai akhir Desember dengan jumlah diklat garmen sebanyak 15 angkatan akhirnya hanya menjadi 13 angkatan dan diklat elektronika semula sebanyak 9 angkatan akhirnya hanya menjadi 8 angkatan ; 2) Adanya pemblokiran anggaran tahap 2 sebesar Rp 247.000.000,00 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan

Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2016

menyebabkan realisasi anggaran secara total menurun dari tahun sebelumnya. Namun jika dihitung berdasarkan pagu anggaran tanpa blokir yaitu sebesar **Rp. 16.456.736.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 16.307.105.727,00** maka besarnya prosentase realisasi anggaran Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2016 sebesar **99,09 %**.

Grafik 3.3 Penyerapan Anggaran Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2013-2016



Sumber: BDI Surabaya

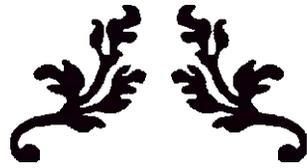
Selama empat tahun terakhir Balai Diklat Industri Surabaya dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri mempunyai penyerapan anggaran rata-rata sebesar 97,82%.

BAB IV

PENUTUP

Dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 16.703.736.000,00** dengan anggaran blokir sebesar Rp. 247.000.000,00 berupa kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri, hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 dari alokasi anggaran yang tersedia telah terserap sebesar **97.63%** dengan **capaian fisik 99,59%** (data ALKI).

Secara umum, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Industri Surabaya bersifat teknik yang memerlukan sosialisasi, koordinasi dan komitmen bersama seluruh pegawai BDI Surabaya agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, diperlukan komitmen dari setiap pejabat di lingkungan Balai Diklat Industri Surabaya untuk melakukan koordinasi dan kerja sama yang lebih optimal guna pencapaian target Balai Diklat Industri Surabaya yang lebih besar. Perencanaan anggaran, penentuan sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai, kesesuaian antara output dengan sub output dan komponen input, antara target yang dicapai dengan anggaran yang diperlukan perlu dicermati kembali. Koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait di luar instansi juga menjadi tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran di masa yang akan datang.



LAMPIRAN 1

Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja





**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulius Sarjono Eddy, SE, MM

Jabatan : Kepala BDI Surabaya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. Mujiyono, MM

Jabatan : Kepala Pusdiklat Industri

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 05 Januari 2016

Pihak Kedua
Kepala Pusdiklat Industri



Drs. Mujiyono, MM



Pihak Pertama
Kepala BDI Surabaya



Yulius Sarjono Eddy, SE, MM



PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi : Balai Diklat Industri Surabaya
Tahun Anggaran : 2016

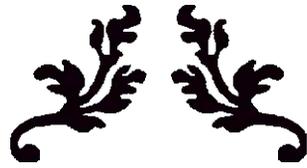
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)			
1	Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal	Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perancangan	85 persen
2	Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional	Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri	1359 Orang/tahun
		SDM aparatur yang kompeten	90 persen
		Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri	25 Orang/tahun
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)			
1	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan	Sertifikasi asesor	10 Orang
		Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)	1 TUK/tahun
2	Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf	Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja	1 Satker
3	Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional	Tingkat penyerapan anggaran	95 persen
4	Berkembangnya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional	Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat	90 persen
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)			
1	Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis	Penerapan sistem manajemen mutu	1 satuan Kerja

Jumlah Anggaran:

- Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri (Rp. 18.059.736.000,-)


Kepala Pusdiklat Industri
Drs. Mujiyono, MM


Surabaya, 05 Januari 2016
Kepala BDI Surabaya
Yulius Sarjono Eddy, SE, MM



LAMPIRAN 2

Pengukuran Kinerja (Berdasarkan Penetapan/Perjanjian Kinerja)



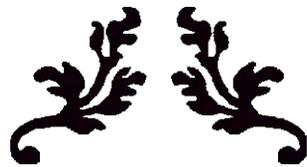
PENGUKURAN KINERJA

(Per 13 Januari 2017)

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	2016			SATUAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)						
1	Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal	Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85	83,33	98,04	Persen
2	Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional	Lulusan Pelatihan three in one (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri	1359	1409	103,68	Orang/tahun
		SDM aparatur yang kompeten	90	100	111,11	persen
		Tersedianya SDM aparatur yang kompeten melalui pelatihan teknis industri	25	0	0,00	Orang/tahun
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)						
1	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan	Sertifikasi asesor	10	4	40,00	Orang
		Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)	1	1	100,00	TUK/Tahun
2	Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf	Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja	1	1	100,00	Satker
3	Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional	Tingkat penyerapan anggaran	95	97,63	102,77	Persen
4	Berkembangnya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional	Pelaksanaan diklat sesuai dengan pola pengembangan diklat	90	0	0,00	Persen
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)						
1	Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis	Penerapan sistem manajemen mutu	1	1	100,00	Satuan Kerja

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2016 : Rp. 16.703.736.000,00

JUMLAH REALISASI ANGGARAN TAHUN : Rp. 16.307.105.727,00



LAMPIRAN 3

Realisasi Anggaran Belanja Bulanan (E-Monitoring)



REALISASI ANGGARAN BELANJA BULANAN DIPA T.A. 2016
BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI		SISA
			TOTAL	%	
1	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	16.703.736.000	16.307.105.727	97,63	396.630.273
1830	Peningkatan Kualitas Sdm Industri	16.703.736.000	16.307.105.727	97,63	396.630.273
1.830.001	Sdm Industri Yang Difasilitasi	96.668.000	96.668.000	100	0
2	Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi	96.668.000	96.668.000	100	0
52	<i>Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi</i>	96.668.000	96.668.000	100	0
A	Tpl Business Plan Penjurian [angkatan 2011 (49 Or X 1 Keg)]	96.668.000	96.668.000	100	0
1.830.002	Dokumen Infrastruktur Kompetensi	142.722.000	126.918.000	88,93	15.804.000
2	Terselenggaranya Pembentukan Lsp (lembaga Sertifikasi Profesi) Bidang Industri	41.860.000	37.500.000	89,58	4.360.000
52	<i>Fasilitasi Pembentukan Lsp (lembaga Sertifikasi Profesi)</i>	41.860.000	37.500.000	89,58	4.360.000
A	Pengelolaan Lsp/tuk Garmen	41.860.000	37.500.000	89,58	4.360.000
4	Tersusunnya Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi	100.862.000	89.418.000	88,65	11.444.000
54	<i>Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi</i>	100.862.000	89.418.000	88,65	11.444.000
A	Sistem Informasi Diklat (simdik)	29.218.000	22.550.000	77,18	6.668.000
B	Penyusunan Dan Pengembangan Program Diklat	71.644.000	66.868.000	93,33	4.776.000
1.830.003	Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan	769.902.000	729.904.300	94,8	39.997.700
1	Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi	336.206.000	311.263.600	92,58	24.942.400
51	<i>Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi</i>	336.206.000	311.263.600	92,58	24.942.400
A	Penyusunan Laporan Keuangan Instansi	15.260.000	11.900.000	77,98	3.360.000
B	Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah	10.960.000	8.600.000	78,47	2.360.000
C	Lakip	6.410.000	4.050.000	63,18	2.360.000
D	Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran	34.060.000	31.700.000	93,07	2.360.000
E	Penyusunan Rkaki	75.372.000	72.566.600	96,28	2.805.400
F	Pengelolaan Administrasi Instansi	41.760.000	39.400.000	94,35	2.360.000
G	Rapat Konsultasi Pimpinan	92.360.000	83.250.000	90,14	9.110.000
H	Sistem Manajemen Mutu Iso	60.024.000	59.797.000	99,62	227.000
2	Tersusunnya Laporan Program Dan Kegiatan	433.696.000	418.640.700	96,53	15.055.300
52	<i>Penyusunan Dokumen Program Dan Kegiatan</i>	433.696.000	418.640.700	96,53	15.055.300
A	Promosi, Monitoring Dan Evaluasi Diklat	97.592.000	88.099.800	90,27	9.492.200
B	Konvensi 5 K	25.014.000	19.620.300	78,44	5.393.700
C	Rapat Kerja Dan Evaluasi Bdi	311.090.000	310.920.600	99,95	169.400
1.830.004	Sdm Aparatur Berbasis Kompetensi	571.878.000	470.535.823	82,28	101.342.177
1	Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, Dan Teknis Industri	514.166.000	470.535.823	91,51	43.630.177
51	<i>Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri</i>	514.166.000	470.535.823	91,51	43.630.177

	A	Magang Ke Perusahaan Industri Dn Bagi Pegawai	49.694.000	38.794.000	78,07	10.900.000
	B	Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya	464.472.000	431.741.823	92,95	32.730.177
3		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pengajar	57.712.000	0	0	57.712.000
	55	Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar	57.712.000	0	0	57.712.000
	A	Penulisan Karya Tulis Ilmiah	57.712.000	0	0	57.712.000
1.830.005		Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi	8.052.000.000	8.017.479.884	99,57	34.520.116
	1	Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1	8.052.000.000	8.017.479.884	99,57	34.520.116
	51	Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1	8.052.000.000	8.017.479.884	99,57	34.520.116
	A	Diklat Garmen Angkatan 1 (80 Org X 20 Hari)	479.850.000	479.808.339	99,99	41.661
	B	Diklat Garmen Angkatan 2 (80 Org X 20 Hari)	478.850.000	478.814.400	99,99	35.600
	C	Diklat Garmen Angkatan 3 (80 Org X 20 Hari)	471.900.000	471.806.300	99,98	93.700
	D	Diklat Garmen Angkatan 4 (80 Org X 20 Hari)	466.500.000	466.433.045	99,99	66.955
	E	Diklat Garmen Angkatan 5 (80 Org X 20 Hari)	477.350.000	477.296.700	99,99	53.300
	F	Diklat Garmen Angkatan 6 (80 Org X 20 Hari)	459.650.000	459.576.300	99,98	73.700
	G	Diklat Garmen Angkatan 7 (80 Org X 20 Hari)	479.900.000	479.857.600	99,99	42.400
	H	Diklat Garmen Angkatan 8 (80 Org X 20 Hari)	479.600.000	479.563.300	99,99	36.700
	I	Diklat Garmen Angkatan 9 (80 Org X 20 Hari)	479.650.000	479.614.000	99,99	36.000
	J	Diklat Garmen Angkatan 10 (80 Org X 20 Hari)	475.400.000	475.385.700	100	14.300
	K	Diklat Garmen Angkatan 11 (80 Org X 20 Hari)	478.650.000	478.592.800	99,99	57.200
	L	Diklat Garmen Angkatan 12 (80 Org X 20 Hari)	477.700.000	477.591.000	99,98	109.000
	M	Diklat Garmen Angkatan 13 (80 Org X 20 Hari)	474.050.000	441.967.500	93,23	32.082.500
	O	Diklat Elektronika Angkatan 1 (50 Org X 10 Hr)	222.750.000	222.733.500	99,99	16.500
	P	Diklat Elektronika Angkatan 2 (50 Org X 10 Hr)	222.290.000	222.263.000	99,99	27.000
	Q	Diklat Elektronika Angkatan 3 (50 Org X 10 Hr)	222.340.000	222.323.500	99,99	16.500
	R	Diklat Elektronika Angkatan 4 (50 Org X 10 Hr)	223.000.000	222.973.000	99,99	27.000
	S	Diklat Elektronika Angkatan 5 (50 Org X 10 Hr)	221.350.000	221.327.700	99,99	22.300
	T	Diklat Elektronika Angkatan 6 (50 Org X 10 Hr)	222.550.000	222.541.000	100	9.000
	U	Diklat Elektronika Angkatan 7 (50 Org X 10 Hr)	221.000.000	220.981.700	99,99	18.300
	V	Diklat Elektronika Angkatan 8 (50 Org X 10 Hr)	222.350.000	222.329.500	99,99	20.500
	W	Diklat Peningkatan Kompetensi Pegawai Bdi Surabaya	95.320.000	93.700.000	98,3	1.620.000
1.830.006		Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.194.342.000	2.189.549.700	99,78	4.792.300
	1	Pembangunan Gedung/bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1.924.342.000	1.923.876.900	99,98	465.100
	8	Gedung Dan Bangunan	1.924.342.000	1.923.876.900	99,98	465.100
	A	Renovasi Gedung Kantin, Penambahan Acp Dan Selasar (800 M2)	1.924.342.000	1.923.876.900	99,98	465.100
	2	Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	270.000.000	265.672.800	98,4	4.327.200
	7	Peralatan Dan Mesin	270.000.000	265.672.800	98,4	4.327.200

	A	Ruang Workshop Diklat Garmen	160.000.000	158.422.800	99,01	1.577.200
	B	Ruang Workshop Diklat Elektronika	110.000.000	107.250.000	97,5	2.750.000
1.830.994		Layanan Perkantoran	4.876.224.000	4.676.050.020	95,89	200.173.980
1		Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	2.479.740.000	2.425.617.801	97,82	54.122.199
	1	Gaji Dan Tunjangan	2.479.740.000	2.425.617.801	97,82	54.122.199
	A	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	2.479.740.000	2.425.617.801	97,82	54.122.199
2		Terselenggaranya Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	2.396.484.000	2.250.432.219	93,91	146.051.781
	2	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	2.396.484.000	2.250.432.219	93,91	146.051.781
	A	Pengelola Dipa	98.640.000	98.640.000	100	0
	B	Layanan Daya Dan Jasa	433.800.000	393.958.957	90,82	39.841.043
	C	Operasional Perkantoran Sehari-hari	792.960.000	788.583.006	99,45	4.376.994
	D	Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat	1.071.084.000	969.250.256	90,49	101.833.744
		TOTAL	16.703.736.000	16.307.105.727	97,63	396.630.273